

**TINJAUAN HUKUM PENGULANGAN KEJAHATAN “*RECIDIVE*”
TINDAK PIDANA NARKOBA
(STUDI PUTUSAN NO. 1062/PID.B/2014/PN.Mks)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh

DWI YULIANTI NUR
NIM. 10500111046

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI YULIANTI NUR
NIM : 10500111046
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 14 Juli 1992
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Hukum, Hukum Pidana
Fakultas/Program : Syariah dan Hukum, Strata satu
Alamat : BTN. Tamarunang Indah Blok F1 No. 15
Judul : Tinjauan Hukum Pengulangan Kejahatan "*Recidive*" Tindak
Pidana Narkoba (Studi Putusan No. 1062/Pid.B/2014/PN.Mks)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 27 Maret 2015

Penyusun,



Dwi Yulianti Nur
NIM: 10500111046

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Pengulangan Kejahatan “*Recidive*” Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan No. 1062/Pid.B/2014/PN.Mks.)”, yang disusun oleh Dwi Yulianti Nur, NIM: 10500111046, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 01 April 2015 M, bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 01 April 2015 M.
11 Jumadil Akhir 1436 H.

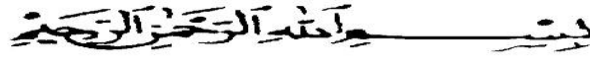
DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamsir, M.Hum.	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. Achmad Abubakar, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Drs. H. Munir Salim, M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Dra. Nila Sastrawaty, M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A.
NIP. 195704141986031003

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, Maha Besar Allah swt., Sang pemilik segala ilmu dan semesta alam. Segala puja dan puji bagi-Nya atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pengulangan Kejahatan “*Recidive*” Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan No.1062/Pid.B/2014/PN.Mks)” dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat dan salam terhaturkan untuk Sang Baginda Rasulullah saw. beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulisan skripsi ini tidak akan pernah berhasil tanpa doa dan dukungan dari segenap keluarga besar penulis, terkhusus pada kedua orang tua penulis, yaitu ayahanda Syarifuddin, S.H. dan Ibunda Hasmah. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan serta doa restu yang tulus diberikan kepada penulis.

Selain itu penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah swt. sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan

kepada Bapak Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Nila Sastrawaty, M.Si. selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar selaku pimpinan tertinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A. selaku Dekan, dan Jajaran Wakil Dekan satu, dua, dan tiga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Hamzir, S.H., M.Hum. selaku ketua jurusan dan Ibu Istiqamah, S.H., M.H. selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak/Ibu dosen serta Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta para staf/jajarannya yang telah memberi kesempatan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian.
6. Rekan-rekan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, khususnya jurusan Ilmu Hukum dan terkhusus pada rekan-rekan Ilmu Hukum 3 dan 4 serta angkatan 2011.

7. Rekan-rekan seperjuangan, Miftahul Jannah, Maulana Mappaodang, Akhirul Auladita dan Andi Ainun Jariah yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan bantuan hingga terselesaikannya skripsi ini. Serta teman-teman KKN Profesi Angkatan ke V UIN Alauddin Makassar Posko IV Dusun Barasa, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
8. Teman-teman organisasi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Makassar dan Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) UIN Alauddin Makassar.
9. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Makassar, 20 Maret 2015

Penulis

DWI YULIANTI NUR

NIM. 10500111046

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	14
A. Landasan Teori	14
B. Pengertian Narkoba, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba	20
C. Recidive (Pengulangan Tindak Pidana)Laporan dan Pengaduan ...	23
D. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba	24
E. Upaya Penanggulangan Narkoba	32
F. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkoba.....	35

BAB III. METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Lokasi Penelitian Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Sumber Data	41
D. Metode Pengumpulan Data	42
E. Instrumen Penelitian	42
F. Teknik Pengolahan Data	43
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Penerapan Hukum <i>Recidive</i> Penyalahgunaan Narkoba	
Dalam Putusan Nomor: 1062/Pid.B/2014/PN.Mks	44
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	
Nomor : 1062/Pid.B/2014/PN.Mks	56
BAB V. P E N U T U P.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Implikasi Penelitian	65
KEPUSTAKAAN	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

ABSTRAK

Nama : Dwi Yulianti Nur
NIM : 10500111046
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Hukum Pengulangan Kejahatan “*Recidive*” Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan No. 1062/Pid.B/2014/PN.Mks.)

Penulisan skripsi ini menitik beratkan penelitian tentang tinjauan hukum pengulangan kejahatan “*recidive*” tindak pidana narkoba dalam putusan nomor: 1062/Pid.B/2014/PN.Mks.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukum terhadap *recidive* penyalahgunaan narkoba dalam putusan nomor: 1062/Pid.B/2014/PN.Mks. dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan nomor: 1062/Pid.B/2014/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini digunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan ataupun kepustakaan dianalisis dengan menggunakan studi analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa: 1) Penerapan Hukum *Recidive* Penyalahgunaan Narkoba dalam putusan nomor: 1062/Pid.B/2014/PN.Mks. yang mengacu pada undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika belum sepenuhnya sesuai sebab Jaksa Penuntut Umum tidak mengaitkan pasal 127 ayat (1) huruf a dengan pasal 144 ayat (1) undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2) Hakim dalam memutus perkara ini kurang teliti karena tidak/lupa untuk mempertimbangkan masalah pemberatan pidana terhadap seorang *residivis* sehingga hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari yang dituntut Jaksa penuntut umum.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Diharapkan adanya sosialisasi sedini mungkin tentang narkoba terhadap anak baik dari orang tua, guru maupun instansi pemerintah. 2) Diharapkan kepada pihak kepolisian dan masyarakat agar senantiasa bekerjasama dalam mengawasi peredaran narkoba. 3) Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana narkotika, sebaiknya memperhatikan bahwa terdakwa penyalahgunaan narkoba sesungguhnya juga adalah merupakan korban peredaran gelap narkoba yang perlu direhabilitasi. Sehingga penting bagi hakim untuk mempertimbangkan pasal 54 undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika. 4) Penuntut umum dan hakim seharusnya menerapkan pemberatan pidana terhadap *residivis*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia bukanlah makhluk yang dapat hidup sendiri, ia adalah makhluk sosial yang memerlukan orang lain untuk bersosialisasi dan berinteraksi sehingga tanpa sadar manusia membentuk sebuah kelompok yang disebut masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah laku dan perbuatan manusia diatur oleh hukum, baik hukum adat, hukum islam maupun hukum positif.

Indonesia adalah salah satu negara yang berdasarkan pada hukum sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, setiap tingkah laku warga negaranya harus berdasarkan hukum. Telah banyak aturan hukum yang dibuat untuk mengatur warga negara Indonesia baik dalam bentuk undang-undang maupun perda. Dalam hukum pidana Indonesia dikenal asas legalitas, dimana suatu perbuatan tidak dapat dipidana tanpa ada hukum yang mengatur. Salah satu tindak pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia adalah tindak pidana narkoba.

Narkoba merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan atau zat, bukan makanan, yang jika masuk

kedalam tubuh manusia, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat).¹

Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya.²

Narkoba memiliki dua sisi akibat, positif dan negatif. Sisi positif narkoba yaitu berfungsi dalam hal pelayanan medis atau kesehatan dan ilmu pengetahuan. Namun sisi negatif dari narkoba adalah munculnya ketergantungan yang menyebabkan mudharat (daya rusak) bagi pemakainnya seperti kerusakan moral dan fisik. Kerusakan fisik dalam hal ini adalah munculnya penyakit mematikan seperti HIV dan AIDS bagi si pemakai maupun keluarganya. Tidak berhenti disitu, efek dari ketergantungan narkoba juga akan menimbulkan pola perkembangan penyakit dalam

¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Modul Untuk Remaja: Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati* (n.p., 2007), h. 3.

² Haryanto, "Pengertian Narkoba dan Jenis-Jenis Narkoba", *Belajarpsikologi.com*. <http://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/> (8 Desember 2014).

masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian atau penodongan, pemerkosaan, pelacuran atau prostitusi dan lain-lain. Orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba lazimnya disebut dengan pecandu.

Waktu Islam lahir, zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (*khamar*), Namun dalam perkembangan dunia Islam, *khamar* kemudian bergesekan, bermetamorfosa dan beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian lazim disebut narkoba atau lebih luas lagi narkoba. Untuk itu, dalam analoginya, larangan mengonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan, adalah sama dengan larangan mengonsumsi narkoba³ Berikut adalah firman Allah dalam QS. Al-Maidah/5: 90 yang menjelaskan tentang *khamar*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁴

Ayat diatas berbicara mengenai haramnya *khamar*. Yang dimaksud dengan *khamar* dalam islam bukan sebatas arak atau minuman beralkohol saja, akan tetapi

³ Rudi Qunsul, “Narkoba Menurut Pandangan Agama”, *Blog My Life*. <http://sarahmay.selu.blogspot.com/2012/12/narkoba-menurut-agama.html> (01 Desember 2014).

⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

juga termasuk didalamnya setiap zat yang dapat memabukkan baik yang berbentuk cair maupun zat padat.⁵ Sesuai hadist Rasulullah saw.:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya:

“Setiap (minuman) yang memabukkan itu khamr, dan setiap khamr itu haram”.

(HR. Muslim dan Daruquthni).⁶

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ
يُذَمُّهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرِبْهَا فِي الْآخِرَةِ

Artinya:

“Setiap minuman yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barang siapa minum khamar di dunia lalu ia mati dalam keadaan masih tetap meminumnya (kecanduan) dan tidak bertobat, maka ia tidak akan dapat meminumnya di akhirat (di surga).” (HR. Muslim).⁷

Hadis diatas telah menjelaskan bahwa setiap zat, bahan atau minuman yang dapat memabukan (merusak fungsi akal) adalah *khamar* dan setiap *khamar* itu haram. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa narkoba juga merupakan *khamar*, sehingga narkoba adalah haram. Walaupun *khamar* dan narkoba memiliki manfaat akan tetapi mudharatnya jauh lebih banyak.

⁵ Rudi Qunsul, “Narkoba Menurut Pandangan Agama.” *Blog My Life* (01 Desember 2014).

⁶ Tukiman, “Hukum Islam Tentang Khamer (Minuman Keras).” *Tukiman Blog*. <https://tukiman25.wordpress.com/2013/03/16/hukum-islam-tentang-khamer-minuman-keras/> (02 April 2015)

⁷ Agus Nizami, “Minuman Keras dan Narkoba (Arak/Khamar) itu Haram.” *Media Islam*. <http://media-islam.or.id/2012/10/10/minuman-keras-dan-narkoba-arakkhamar-itu-haram/> (02 April 2015)

Karena melihat dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh narkoba atau narkotika di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang Narkotika tertanggal 10 Februari 1976 yang menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah haram hukumnya kemudian tertanggal 2 September 1996 yang memutuskan bahwa menyalahgunakan narkotika (*Ectasy* dan zat-zat sejenis lainnya) adalah haram hukumnya.⁸

Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba semakin banyak dan sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penggunaannya merata di semua elemen mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan artis, politisi dan penegak hukum juga tidak luput dari penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba yang ditujukan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Kasus penyalahgunaan narkoba merupakan kasus yang sangat serius terlebih lagi dalam beberapa tahun ini kasus tersebut meningkat pesat dan menjadi salah satu kasus yang sering muncul di televisi dan media cetak.

Dalam hukum pidana di Indonesia tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 dan diganti ke Undang-undang No. 22 Tahun 1997 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

⁸ Rudi Qunsul, "Narkoba Menurut Pandangan Agama." *Blog My Life* (01 Desember 2014).

Dalam undang-undang no. 9 tahun 1976 tentang narkotika, ketentuan pidana terletak pada Bab VIII pasal 36 – pasal 53 kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, ketentuan pidana diatur dalam pasal 78 - pasal 100 dan telah diperbaharui dalam Bab XV tentang sanksi pidana yaitu pasal 111 sampai pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, ketentuan pidana diatur pada Bab XIV yakni pasal 59 – pasal 72. Pada umumnya segala tindak pidana di Indonesia akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan (*treatment*).⁹

Namun dalam praktiknya, undang-undang tentang narkoba belum terlaksana secara efektif, sehingga penyalahgunaan narkoba cenderung mengalami peningkatan dan yang lebih memprihatinkan lagi semakin banyak remaja atau kaum muda yang terjerat oleh narkoba. Tak hanya hal tersebut, beberapa diantara pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut masih sering mengulangi kejahatannya.

Salah satu residivis narkoba yang sempat menghebohkan warga Indonesia adalah Freddy Budiman karena pengakuan pacarnya Vanny Rossyane yang mengungkapkan tentang keberadaan ruangan didalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang yang sering digunakan mereka untuk menikmati narkoba dan berhubungan seks. Freddy Budiman boleh dibilang sudah menjadi seorang Bandar

⁹ Moh. Taufik Makaro, dkk, *Tindak Pidana Narkotika* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 46.

narkotika tulen. Berkali-kali terjerat kasus Narkoba tak membuatnya jera. Bahkan, ia masih bisa mengendalikan peredaran narkoba dari balik jeruji penjara.¹⁰

Pengulangan tindak pidana (*Recidive*) biasanya terjadi karena tidak adanya efek jera yang didapatkan oleh si pelaku. *Recidive* dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu, baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku III. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut system *Recidive* Khusus, artinya: “pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.”¹¹ Ketentuan dalam KUHP mengenai pemberatan pidana diatur dalam pasal 486, 487 dan 488.

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penyusun merasa perlu melakukan pengkajian lebih jauh tentang ketentuan *Recidive* peyalahguna narkoba secara yuridis. Sehingga penyusun tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Pengulangan Kejahatan “*Recidive*” Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor: 1062/Pid.B/2014/PN.Mks).”**

¹⁰ Tri Wahono, “Freddy Budiman, Bandar Narkotika Sejak 2009”. *Megapolitan Kompas.com Online*, 27 Juli 2013. <http://megapolitan.kompas.com/read/2013/07/27/1145459/Freddy.Budiman.Bandar.Narkotika.sejak.2009> (05 Januari 2015).

¹¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), h. 198.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tercapailah pointer fokus sebagai representasi dari fokus penelitian yaitu mengenai pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana Narkoba.

Adapun deskripsi fokus merujuk pada putusan nomor: 1062/Pid.B/2014/PN.Mks, untuk mengetahui apakah putusan tersebut sudah menimbulkan efek jera bagi pelaku pengulangan kejahatan (*Recidive*) Tindak Pidana Narkoba yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar.

Tinjauan Hukum atau tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai pandangan dari segi hukum.

Pengulangan Kejahatan atau *Recidive* terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi.¹²

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2002 tentang grasi, putusan dikatakan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) adalah

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh KUHAP (batas waktu pengajuan banding berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHAP adalah 7 (tujuh) hari sesudah putusan

¹² Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bidang Akademik Jl. Marsd Adisucipto UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), h. 63.

dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir);

2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang telah ditentukan oleh KUHAP (batas waktu pengajuan kasasi berdasarkan pasal 245 ayat (1) KUHAP adalah 14 (empatbelas hari) sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa;

3. Putusan kasasi.

Narkoba pada dasarnya adalah singkata dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Sedangkan Narkoba menurut wresniwiro adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi saraf sentral.¹³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah tinjauan hukum pengulangan kejahatan (*Recidive*) tindak pidana narkoba? Adapun sub-sub permasalahannya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum tentang *recidive* penyalahguna narkoba dalam putusan nomor: 1062/Pid.B/2014/PN.Mks ?

¹³ Ika Shee Frinka, "Pengertian Narkoba Menurut Para Ahli", *Scribd*, <https://www.scribd.com/doc/115186215/Pengertian-Narkoba-Menurut-Para-Ahli> (15 Desember 2014).

2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor: 1062/Pid.B/2014/PN.Mks ?

D. Kajian Pustaka

Agar dapat menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan literatur hasil penelitian terdahulu. Penelitian hukum tersebut antara lain:

“Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta” skripsi yang disusun pada tahun 2013 oleh Leni Ainurrohmah yakni membahas tentang metode pembinaan secara umum yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta dan kesesuaiannya dengan peraturan pembinaan yang ada.¹⁴ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penyusun yakni dalam hal pembahasan tindak pidana narkotika, namun penyusun lebih menekankan pada pengulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba.

“Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr)” skripsi yang disusun pada tahun 2011 oleh Dimas Pradana yakni membahas tentang kesesuaian putusan hakim dengan teori peringanan dan pemberatan dalam hukum pidana juga kesesuaiannya dalam teori pemidanaan. Yakni putusan tersebut tidak sesuai dengan teori peringanan dan pemberatan, dan juga tidak menyimpang dari teori pemidanaan tetapi putusan

¹⁴ Leni Ainurrohmah, “Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013).

tersebut belum memenuhi tujuan pemidanaan.¹⁵ Persamaan penelitian ini yakni membahas tentang residivis tidak pidana narkoba, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yakni penyusun lebih menekankan pada penerapan hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 1062/Pid.B/PN.Mks.

“Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas II A Sungguminasa)” skripsi yang disusun pada tahun 2013 oleh Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan membahas tentang upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas II A Sungguminasa dalam menekan angka ketergantungan narkoba bagi warga binaan dan sejauh mana tingkat keberhasilan lepas dalam pelaksanaan pemidanaan pelaku penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas II A Sungguminasa.¹⁶ Persamaan dalam penelitian ini yakni pembahasan mengenai tindak pidana narkoba, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yakni penyusun lebih menekankan pada *recidive* penyalahgunaan narkoba.

“Penerapan Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klas I A Padang)”, skripsi yang disusun pada tahun 2008 oleh Nazif Firdaus membahas tentang tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah

¹⁵ Dimas Pradana, “Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr), *Skripsi* (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011).

¹⁶ Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan, “Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sungguminasa)”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).

hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang pada tahun 2005 sampai tahun 2007 terus meningkat dan apa saja faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara residivis tindak pidana narkoba.¹⁷ Persamaan penelitian ini yakni dalam membahas residivis tindak pidana narkoba, sedangkan perbedaan dari penelitian ini yakni terdapat pada nomor putusan dan tempat penelitiannya.

“Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional (BNN/Kota) Padang (Studi kasus di BNNK/Kota Padang)”, skripsi yang disusun pada tahun 2011 oleh Zelni Putra membahas tentang bagaimana kebijakan BNN/Kota Padang dalam upaya rehabilitasi, prosedur dalam penetapan rehabilitasi bagi pecandu dan syarat-syarat seseorang untuk direhabilitasi oleh BNNK/Kota Padang serta kendala yang dihadapi BNNK/Kota Padang dalam upaya rehabilitasi dan penanggulangannya.¹⁸ Penelitian ini sama-sama membahas tentang tindak pidana narkoba, sedangkan perbedaan penelitian ini yakni penelitian ini lebih kepada pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Dalam hal penelitian ini, diketahui bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang tinjauan hukum pengulangan kejahatan (*Recidive*) tindak pidana narkoba sesuai dengan putusan Nomor: 1062/Pid.B/2014/PN.Mks.

¹⁷ Azif Firdaus, “Penerapan Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klas I A Padang)”, *Skripsi* (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2008).

¹⁸ Zelni Putra, “Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional (BNN/Kota) Padang (Studi Kasus di BNNK/Kota Padang)”, *Skripsi* (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011).

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum tentang *recidive* penyalahgunaan narkoba pada putusan nomor: 1062/Pid.B/2014/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor: 1062/Pid.B/2014/PN.Mks.

Adapun penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi kalangan akademik dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang tinjauan hukum terhadap pengulangan tindak pidana narkoba.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹ Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.²

D. Van Hamel, merumuskan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut).³

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), h. 1.

² Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 27.

³ Fitrotin Jamilah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2014), h. 18.

Pengenaan suatu nestapa pada orang yang melanggar aturan bukanlah tujuan akhir melainkan tujuan terdekat pemidanaan.

Menurut Muladi, tujuan pemidanaan ada 4 (empat), antara lain:⁴

- a. Pencegahan
- b. Perlindungan masyarakat
- c. Memelihara solidaritas masyarakat
- d. Pidana bersifat pengimbalan/pengimbangan.

Sehingga tujuan hukum pidana adalah untuk mencegah gejala-gejala sosial yang kurang sehat, sehingga masyarakat yang terlanjur berbuat tidak baik perlu diberikan pengobatan agar perbuatannya tidak berlanjut dan tidak merugikan orang lain terlalu lama. Menurut pandangan Sudarto tentang tujuan hukum pidana adalah agar masyarakat tidak melakukan tindak kejahatan dan tertib dalam kehidupan.

Hukum Pidana di Indonesia tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi juga diatur dalam aturan diluar KUHP seperti Undang-undang tentang Narkotika yakni Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 yang digantikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan telah diperbaharui mejadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sedangkan pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa

⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 1985), h. 81-86.

pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁵ Dalam bahasa asing tak hanya istilah *Stratbaar Feit* yang berkenaan dengan tindak pidana tetapi juga istilah *Delict*.

Sedangkan menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut.⁶

Sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 ayat (1) KUHP dikenal adanya asas Legalitas yang mana tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya. Penyalahgunaan narkoba adalah tindak pidana, dimana perbuatan tersebut dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana jika dilanggar akan diberi sanksi berupa pidana dan juga denda.

2. Teori Pidana

Pemidanaan dan hukum tidak dapat dipisahkan. Pemidanaan atau penjatuan hukuman/sanksi adalah bagian terpenting dari hukum. Karena dengan keberadaan pemidanaan, maka hukum akan memiliki ketegasan dan kekuatan yang

⁵ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, t.t.), hal. 62.

⁶ Fitrotin Jamilah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 18.

akan selalu mengikat setiap orang. Pidanaan juga merupakan suatu akibat dari melanggar aturan atau hukum. Sehingga pidanaan adalah salah satu alasan mengapa hukum harus ditaati.

Sistem pidanaan atau *The Sentencing System* menurut L.H.C. Hulsman merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).⁷

Sedangkan Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidanaan itu sebagai (pidana) dan cara (pidanaan).⁸ Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian sistem pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan itu mencakup pengertian:⁹

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) pidanaan.
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana.
- c. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.

⁷ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus* (Bandung: PT. Alumni, 2012), h. 58.

⁸ Andi Hamsah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986), h. 1.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 136.

- d. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengenai pembenaran pembedaan. Menurut Satohid Kartanegara dan para ahli hukum pidana lainnya, mengemukakan bahwa teori pembedaan dibagi menjadi tiga aliran yaitu:¹⁰

a. *Absolute* atau *vergelding theorieen* (*vegelden*/imbalan)

Aliran ini mengajarkan dasar dari pembedaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena perbuatan itu menimbulkan penderitaan bagi korban.

b. *Relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pembedaan adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pembedaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pembedaan (*net van de straf*)

c. *Vergeningings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pembedaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pembedaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri,

¹⁰ Satohid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu* (Jakarta: Balai Lektur mahasiswa, t.t.), h. 56.

yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakuinya pula sebagai dasar pembedaan itu adalah tujuan dari pidana hukum.

Berdasarkan teori pembedaan diatas, pada dasarnya penjatuhan pidana digunakan sebagai pemberi pelajaran atau pemberi efek jera bagi pelaku tindak pidana agar pelaku tidak pengulangi tindak pidana yang dilakukannya juga sebagai peringatan kepada orang lain (masyarakat) untuk tidak melakukan tindak pidana.

Dalam perkembangannya, keberadaan pembedaan berangsur mengalami perubahan. Karena dalam hal pembedaan telah dikenal sistem pembedaan dua jalur (*double track system*). Dalam sudut *double track system*, jenis sanksi dan hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu sanksi pidana (*punishment*) dan sanksi tindakan (*treatment*).¹¹ Hal ini agar tujuan pembedaan untuk pembalasan, pencegahan serta pembenahan dapat tercapai sehingga masyarakat akan merasa aman dan sejahtera.

Segala upaya sangat dibutuhkan untuk melindungi dan mensejahterahkan masyarakat. Sehingga dengan menerapkan ketentuan *recidive* kedalam berbagai ketentuan tindak pidana merupakan salah satu upaya yang diperlukan. Karena dengan mengulangi suatu kejahatan telah membuktikan bahwa sudah tidak ada rasa kesadaran dan tidak adanya keinginan untuk berubah baik, sehingga pengulangan kejahatan (*recidive*) perlu diberikan pemberatan.

¹¹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 161.

B. Pengertian Narkoba, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Berdasarkan Surat Edaran No.03/IV/2002/BNN tertanggal 22 April 2002, akronim dari narkoba adalah narkotika, psikotropika dan bahan-bahan/zat adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan atau zat bukan makanan, yang jika masuk kedalam tubuh manusia, berpengaruh terutama pada kerja otak (Susunan Syaraf pusat).¹²

Berdasarkan surat edaran tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa narkoba dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

a. Narkotika

Smith Kline dan Frech Clinical Staff, mengemukakan bahwa:

*“narcotic are drugs which product insensibility or stuporduce to their depresant offer on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivativis (morphine, codein, methadone).”*¹³

Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan

¹² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Modul Untuk Remaja: Mencegah Lebih Baik Dari Pada Mengobati*, h. 3.

¹³ Moh. Taufik Makaro, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, h. 18.

sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.¹⁴ Golongan narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dibagi menjadi 3 (tiga) golongan.

b. Psikotropika

Psikotropika menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku.¹⁵ Berdasarkan undang-undang tentang psikotropika diatas, psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, namun setelah diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan kedalam golongan narkotika, sehingga saat ini golongan psikotropika hanya golongan III dan IV.

c. Bahan Adiktif Lainnya

Bahan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan ketergantungan pada pemakainya.¹⁶

Sejatinya narkoba merupakan zat yang dapat merusak syaraf otak manusia dan mempunyai akibat sindroma ketergantungan kepada penggunaanya, sehingga jika narkoba digunakan tidak pada tempatnya yang benar, akan menimbulkan bahaya bagi penggunaanya, bahkan dapat mengakibatkan kematian.¹⁷

¹⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁵ Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

¹⁶ Haryanto, "Belajarpsikologi.com: Pengertian Narkoba."

¹⁷ Achmad Rifai, *Narkoba Dibalik Tembok Penjara* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h.

2. Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba saat ini menjadi topik yang sangat universal. Bahkan di Indonesia sendiri penyalahgunaan dan peredaran narkoba semakin marak sehingga menjadi sebuah permasalahan serius.

a. Penyalahgunaan Narkoba

Istilah penyalahgunaan merupakan istilah yang biasa dipakai dalam dunia klinis atau *medik psikiatrik* yang menunjukkan ciri pemakaian yang bersifat patologik yang perlu dibedakan dengan tingkat pemakaian psikologik sosial, yang belum bersifat *patologik*. Penyalahgunaan (*abuse*) adalah pemakaian sebagai suatu pola penggunaan yang bersifat *patologik* atau klinis (menyimpang) yang ditandai oleh *intoksikasi* sepanjang hari, tidak mampu mengurangi atau menghentikan, berusaha berulang kali mengendalikan, terus menggunakan walaupun sakit fisiknya kambuh. Keadaan ini akan menimbulkan gangguan fungsional atau *okupasional* yang ditandai oleh tugas dan relasi dalam keluarga tak terpenuhi dengan baik, perilaku agresif dan tidak wajar, hubungan dengan kawan terganggu, sering bolos sekolah atau kerja, melanggar hukum atau kriminal dan tak mampu berfungsi secara efektif.¹⁸

Dalam pasal 1 ayat (1) angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹⁹

¹⁸ Dimas Pradana, "Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr)", *Skripsi*, h. 21-22.

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Sehingga penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara berkala dan teratur diluar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan fungsi sosial.

b. Peredaran Narkoba

Peredaran narkoba adalah kegiatan perputaran narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan pasal 35 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁰

C. *Recidive (Pengulangan Tindak Pidana)*

Pengulangan tindak pidana atau *recidive* yaitu seseorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*) kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.²¹

A. Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa *recidive* atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana oleh orang yang sama mewujudkan lagi suatu

²⁰ Pasal 35 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

²¹ Tien s. Hulukati, *Hukum Pidana* (Bandung: t.p., 2014), h. 200.

delik, yang diantara oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik.²²

Recidive terjadi dalam hal seseorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi.

Recidive atau pengulangan tindak pidana dapat dijadikan alasan pemberatan pidana. Dalam pasal 12 ayat 3 KUHP diatur bahwa karena alasan *recidive* pidana penjara boleh diputuskan sampai 20 tahun, walaupun secara umum pidana penjara maksimum dijatuhkan selama 15 tahun. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur tentang pengulangan kejahatan yakni pada pasal 144.

D. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba

1. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Ada banyak faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, baik faktor yang datang dari dalam diri seseorang maupun faktor dari luar. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

a. Faktor Peredaran Narkoba Yang Semakin Meningkat

Ini merupakan faktor utama dalam penyalahgunaan narkoba, sebab pada umumnya seseorang tidak akan menggunakan narkoba jika barang tersebut tidak tersedia. Semakin banyaknya narkoba yang beredar di Indonesia membuat seseorang

²² Tien S. Hulukati, *Hukum Pidana*, h. 200.

lebih mudah dalam mendapatkannya. Sehingga semakin banyak orang yang terjerumus menggunakannya.

b. Faktor Kepribadian

Kepribadian-kepribadian tertentu punya kecenderungan potensial untuk menyalahgunakan narkoba. Apalagi kalau yang bersangkutan sedang mengalami masalah-masalah sulit. Dalam situasi demikianlah nilai-nilai kemanusiaan seseorang menjadi kacau sehingga menjadi lebih rentan tanpa seleksi terhadap hal-hal baru termasuk narkoba.

Berikut ini beberapa kepribadian yang potensial (dapat) terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba:²³

1) Kepribadian Yang Mudah Stres

Ia gampang mempersalahkan diri atau orang lain. Dan selalu merasa tidak puas. Tampaknya sok hebat, sok sempurna, sok nekat.

2) Kepribadian Yang Terlalu Nekat

Ada orang yang terlalu sibuk sampai frustrasi dan kebingungan sendiri. Ada yang terlalu malas, sehingga bosan sendiri. Ada pula yang nekat tanpa mau dengar orang lain sehingga memaksakan gagasan aneh penuh ilusi. Tak heran, kalau konflik dengan orang mudah terjadi.

3) Kepribadian Yang Tidak Tahan Perubahan

Ia alergi terhadap perubahan-perubahan seperti cuaca, makanan, orang baru, tugas baru dan sebagainya. Ia mudah bingung atau akan bereaksi secara meledak.

²³ Tim Visi Media, *Mencegah Terjerumus Narkoba* (t.t.: Tim Visi Media, 2006), h. 28-29.

4) Kepribadian Yang Tidak Tahu Atau Tidak Mampu Mengurus Diri

Semua jadi kacau, tanpa patokan, tanpa disiplin, tanpa wawasan hidup, lingkungan, suasana menjadi hambar, jarak dan jungkir balik. Kesehatan yang akan kacau dan ia mulai mengidap seperti penyakit fisik dan sosial.

5) Kepribadian Yang Demam Obat

Ada saja penyakitnya, baik karena stress atau disebabkan oleh stress maupun karena tidak tahu mengurus diri atau penyakit cacat bawaan. Pokoknya banyak keluhan, kerjanya cari-cari obat, cari-cari kombinasi untuk obat mujarab, bahkan badannya menjadi apotik hidup. Obat berikut pasti narkoba.

c. Faktor Lingkungan

1) Faktor Keluarga

Keluarga merupakan hal terpenting bagi setiap manusia. Tahap awal dari hidup adalah keluarga. Keluarga akan mengajarkan banyak hal, sehingga jika seseorang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang bahagia maka kehidupannya akan senantiasa berjalan dengan baik. Sedangkan seseorang yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berantakan lebih rentan terjerat oleh narkoba.

Orang tua seharusnya sebagai contoh yang baik. Orang tua menyadari bahwa kebiasaan dalam keluarga besar pengaruhnya pada anak-anak. Orang tua yang biasa menyalahgunakan minuman keras dan rokok dapat mempengaruhi anak untuk ikut menyalahgunakan zat-zat tersebut. Jika ayah atau ibu pemabuk atau selalu menggunakan obat setiap kali merasa sakit, kemungkinan besar juga anak-anak

menjadi pengguna alkohol dan obat-obatan. Yang dituntut oleh anak-anak dari setiap orang tua sebenarnya menjadi figur yang dapat diteladani.²⁴

2) Faktor Tekanan Kelompok Sebaya

Kelompok sebaya adalah tempat kedua setelah keluarga yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Teman sebaya merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi masa remaja. Pengaruh itu dapat positif, namun seringkali negatif. Tekanan ini dapat memperlambat, mengubah, bahkan mengatur gaya hidup seseorang.²⁵

Seseorang yang dari keluarga baik-baikpun bisa terjerumus kepada hal-hal buruk seperti merokok dan minum-minuman keras juga narkoba jika mendapat tekanan dari teman sebaya. Terlebih lagi seseorang yang memang berasal dari keluarga yang berantakan.

Menurut **Dr.Graham Bline**, penyalahgunaan narkotika dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu :

1. Faktor intern (dari dalam dirinya)
 - a. sebagai proses untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi berwenang,
 - b. mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual,
 - c. membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan penuh resiko,
 - d. berusaha mendapatkan atau mencari arti daripada hidup,
 - e. melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional,
 - f. mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, disebabkan kurang kesibukan,
 - g. mengikuti kemauan teman dan untuk memupuk rasa solidaritas dan setia kawan,
 - h. didorong rasa ingin tahu dan karena iseng.

2. Faktor Ekstern

²⁴ Tim Visi Media, *Mencegah Terjerumus Narkoba*, h. 32.

²⁵ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Modul Untuk Remaja: Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati*, h. 94-95.

- a. Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi muda ke lembah siksa narkoba
- b. Adanya situasi yang disharmoniskan (*broken home*) dalam keluarga, tidak ada rasa kasih sayang (*emosional*), renggangnya hubungan antara ayah dan ibu, orang tua dan anak serta antara anak-anaknya sendiri,
- c. Karena politik yang ingin mendiskreditkan lawannya dengan menjerumuskan generasi muda atau remaja.
- d. Penyalahgunaan narkoba merupakan wabah yang harus mendapatkan penanggulangan yang serius dan menyeluruh. Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu. Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat.²⁶

Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba tidak hanya dikarenakan ketersediaan narkoba itu sendiri. Hal tersebut dapat pula disebabkan oleh kepribadian seseorang dan lingkungan sekitarnya.

2. Faktor-Faktor Penyebab Peredaran Narkoba

Terjadinya kejahatan narkoba di Indonesia dipengaruhi oleh faktor dan sebab sebagaimana terjadinya kejahatan pada umumnya. Kejahatan narkoba disebabkan oleh faktor berikut:

a. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan alasan paling mendasar seseorang melakukan perbuatan pidana, hal ini terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga pengangguran dimana-mana dan cara apapun akan dilakukan untuk memenuhi

²⁶ Rio Sungsang Wienahyu, "Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 68/Pid.Sus/2011/Pn.Pwt)", *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Hukum Purwokerto, 2012), h. 39-40.

kebutuhan dan bertahan hidup meskipun itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah serta norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat.²⁷

b. Faktor Sosiologi Hukum

Faktor penyebab pengedaran Narkoba di Indonesia dilihat dari aspek sosiologi hukum adalah sebagai berikut:²⁸

1) Berlakunya hukum pasar “*supply and demand*”.

Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), suatu badan yang “mengurusi” narkoba, menginformasikan bahwa sekitar 1,5% dari jumlah penduduk Indonesia (sekitar 3,2 juta orang) adalah penyalahguna narkoba. Sekitar 40 orang per hari telah meninggal dunia secara sia-sia karena narkoba. Hampir 70% dari semua penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara adalah narapidana atau tahanan dalam perkara.

Selama *demand* (permintaan) masih ada, maka selama itu *supply* (penyediaan) akan berusaha ada. Dengan kata lain, selama pemakai dan pembeli masih ada, maka selama itu penjual akan selalu ada. Siapa yang bisa mencegah keinginan seseorang atau masyarakat untuk memakai narkoba. jawabnya adalah orang atau masyarakat itu sendiri. Sehingga ada atau tidaknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di seluruh dunia termasuk di seluruh Indonesia, adalah

²⁷ Ayib Rosidin, “Kejahatan Narkotika dan Upaya Penanggulangannya”, *Blog Ayib Rosidin*. <http://ajhieblog.blogspot.com/2012/05/kejahatan-narkotika-dan-upaya.html> (4 Januari 2015).

²⁸ Budi Setioko, “Faktor Penyebab Pengedaran Narkoba Di Indonesia Di Lihat Dari Aspek Sosiologi Hukum”, *Blog Sipakalabbi*. <http://zainuddion.blogspot.com/2009/09/faktor-penyebab-pengedaran-narkoba-di.html> (4 Januari 2015).

tergantung dari masyarakat di dunia dan rakyat Indonesia itu sendiri. Ada yang menilai, salah satu penyebab masyarakat terjebak tindak kejahatan narkoba adalah faktor ekonomi. Dengan kata lain, mereka menggeluti dunia itu, baik sebagai pelaku, pengedar, kurir, pemasok, maupun sebagai bandar narkoba, didorong oleh kondisi ekonomi mereka yang rendah. Apalagi, penghasilan dari penjualan narkoba tentu sangat menggoda banyak orang. Akibatnya, semakin banyak orang yang tergoda masuk ke jaringan haram itu dipastikan para korban di sekitar kita akan semakin banyak. Harus disadari, dengan semakin mudahnya orang mendapatkan narkoba, muncul gejala sosial berupa kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat. Kejahatan narkoba ialah kejahatan kemanusiaan. Dan, kejahatan narkoba merupakan payung dari segala kejahatan.

2) Hukum dan kekuatan-kekuatan sosial.

Kekuatan uang sangatlah berpengaruh, untuk menutupi keperluan hidup yang tidak mencukupi dari gaji yang didapat, dan sebagian untuk menyamakan gaya hidupnya dengan gaya hidup orang lain yang lebih mapan. Malahan kekuasaan yang berlandaskan hukum dipakai untuk mendapatkan uang. Jika diperhatikan dari fakta sosial (*social fact*), aparat hukum di Indonesia belum sepenuhnya professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tidak jarang terjadi aparat penegak hukum yang menyalah gunakan kedudukan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, banyak diantara aparat penegak hukum membuka jalan untuk melanggar hukum dan menimbulkan korupsi dan pungli. Sebagai contoh kasus Jaksa Esther Tanak dan Dara

Veranita yang diduga menggelapkan barang bukti sebanyak 343 butir ekstasi. Dalam kasus ini aparat hukum bertindak merugikan Negara demi mencari keuntungan pribadi untuk memenuhi gaya hidupnya dan sangat ironis seorang penegak hukum di Indonesia yang seharusnya menjadi penegak hukum justru melakukan tindakan yang mencoreng citra dan kewibawaan lembaga penegak hukum.

Kasus penggelapan barang bukti yang diduga dilakukan jaksa Ester Thanak dan Dara Verenita ternyata hanyalah fenomena gunung es dari sekian banyak pelanggaran yang pernah dilakukan oleh oknum jaksa di berbagai daerah. Temuan tersebut dilansir *Indonesia Corruption Watch (ICW)* atas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kurun waktu 2004-2007.

3) Efektivitas hukum dalam masyarakat.

Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Sudah sejauh mana hukum itu diterapkan, apakah sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum sudah mempunyai efek jera kepada para pelaku kejahatan narkoba?. Berapa tahun sanksi yang diberikan kepada orang yang terlibat dalam kasus narkoba baik itu pengguna maupun pengedar, tapi masih saja marak peredaran narkoba tersebut. Ini membuktikan bahwa hukum belum berjalan efektif karena banyaknya sanksi yang dijatuhkan tidak semuanya tegas, malah kadang selesai sebelum sampai diperiksa di pengadilan.

Berbicara mengenai efektivitas hukum yang ditentukan oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum termasuk para penegaknya, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa “taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”. Hukum sebagai pengatur kehidupan masyarakat, setidaknya memiliki kepastian hukum, memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat dan berlaku secara umum. Penerapan hukum menjadi efektif apabila kaidah hukum itu sendiri sejalan dengan hati nurani masyarakat. Sebaliknya hukum seringkali tidak dipatuhi oleh masyarakat, ketika kaidah hukum itu sendiri tidak sejalan dengan keinginan atau harapan masyarakat.

Kemiskinan yang mulai merajalela dan pengangguran yang semakin banyak di beberapa Negara termasuk Indonesia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran narkoba.

E. Upaya Penanggulangan Narkoba

Ada 5 (lima) bentuk penanggulangan masalah narkoba yaitu:

1. Promotif (Pembinaan)

Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba atau bahkan belum mengenal narkoba. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan

peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kegiatan semu dengan memakai narkoba.²⁹

2. Preventif (Program Pencegahan)

Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya.³⁰

Program pencegahan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Pendidikan Agama sejak dini;
- b. Pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan penuh perhatian dan kasih sayang;
- c. Menjalin komunikasi yang konstruktif antara orang tua dan anak;
- d. Orang tua memberikan teladan yang baik kepada anak-anak;
- e. Anak-anak diberikan pengetahuan sedini mungkin tentang narkoba, jenis, dan dampak negatifnya. Seperti melakukan kampanye anti penyalahgunaan narkoba dan beberapa kegiatan lain yang dapat menjadi wadah seseorang untuk mendapatkan informasi.

3. Kuratif (Pengobatan)

Program ini ditujukan kepada masyarakat yang telah terjerumus dan menjadi korban dalam penyalahgunaan narkoba. Pengobatan terhadap pemakai narkoba tidak sederhana, tetapi sangat kompleks dan berbiaya mahal. Selain itu

²⁹ Subagyo Partodihardjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya* (n.p., 2006), h. 100.

³⁰ Subagyo Partodihardjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, h. 100.

kesembuhannya pun merupakan tanda tanya besar.³¹ Tidak sembarang orang boleh mengobati korban penyalahguna narkoba, pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkoba secara khusus.

4. Rehabilitatif (Pemulihan)

Rehabilitatif merupakan kelanjutan dari program kuratif. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.³²

Keseriusan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat dan marak terjadi di Indonesia yakni dengan banyaknya dibangun tempat rehabilitasi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat biasa.

5. Represif

Program represif adalah program tindakan kepada produsen, bandar, pengedar dan pemakai berdasarkan hukum.

Program ini merupakan program instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi dan semua zat yang tergolong narkoba.³³ tidak hanya pemerintah tetapi peran serta masyarakat juga diperlukan dalam menjalankan program ini.

³¹ Subagyo Partodihardjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, h. 103.

³² Subagyo Partodihardjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, h. 105.

³³ Subagyo Partodihardjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, h. 107.

F. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkoba

Pada tahun 1806 seorang dokter dari Westphalia bernama Friedrich Wilhelm yang melakukan modifikasi candu yang dicampur amoniak yang dikenal dengan nama *morphin* (diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama Morphius).³⁴ Apabila kita melihat kebelakang, keberadaan NAPZA/Narkoba di Indonesia memiliki sejarah panjang, narkoba berupa opium masuk ke Indonesia pada tahun 1617. Tindak Pidana Narkoba diatur dalam beberapa aturan hukum yaitu:

1. *Verdoovende Middelen Ordonnantie (VMO) Staatsblad* 1927 No. 278 jo. No. 536 yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia-Belanda. Peraturan tersebut hanya mengatur tentang candu dan obat bius dan melegalkan penggunaannya selama hanya dilakukan ditempat-tempat yang sudah ditetapkan. Tetapi pada zaman pendudukan Jepang, peraturan tersebut dihapuskan dan pemakaian candu dilarang secara mutlak.³⁵
2. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. *Staatsblad* 1949 No. 419 tanggal 22 Desember 1949 tentang *Sterkwerkendegeneesmiddelen Ordonantie* (Ordonansi Obat Keras).
4. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 yang dikeluarkan pada tanggal 8 september 1971. Peraturan ini dikeluarkan karena Pemerintah dan DPR

³⁴ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), h. 2.

³⁵ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, h. 3.

berpendapat bahwa aturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan belanda pada tahun 1927 tidak lagi bisa mengendalikan wabah narkoba. Peraturan tersebut berisi tentang instruksi presiden kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional untuk menanggulangi masalah pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi dan pengawasan orang asing. Kemudian Kepala BAKIN membentuk Bakorlak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugasnya menanggulangi bahaya narkoba.³⁶

5. Undang-undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba beserta protokol yang mengubahnya.
6. Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkoba, diterbitkan untuk menggantikan *Verdoovende Middelen Ordonnantie (VMO) Staatsblad 1927 No. 278 jo. No. 536* sebagai bagian dari kebijakan *penal* dalam upaya pemberantasan narkoba. Undang-undang ini diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3086 dan dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976.
7. Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 213/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Obat Keras Tertentu yang mencabut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 10381/A/SK/1972.

³⁶ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, h. 8.

8. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
9. Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 124/Men.Kes/Per/1993 tentang Obat Keras Tertentu yang merupakan perbaikan dari Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 213/Men.Kes/Per/IV/1985.
10. Undang-Undang No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971).
11. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dituangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1997 No. 10, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3671.
12. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, dibentuk karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan narkoba yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih.³⁷
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 688/Menkes/Per/Vn/1997 tanggal 14 Juli 1997 tentang Peredaran Psikotropika.
14. Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988).

³⁷ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, h.12.

15. Keputusan Presiden RI Nomor 116 Tahun 1999, dasar pembentukan Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN).
16. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN). Keputusan ini berisi tentang BKNN yang diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN)
17. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Lainnya.
18. Kepmenkes Nomor 996/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitas Penyalahgunaan Dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya
19. Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), menjadi dasar pembentukan BNN (Badan Narkotika Nasional).³⁸
20. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1997. Undang-undang ini merubah status lembaga BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke provinsi dan kabupaten/kota.³⁹

³⁸ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, h. 35.

³⁹ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, h. 36.

21. Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 , mengatur lebih lanjut tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).
22. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor
23. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
24. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika didalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
25. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK 00 05 42 6575 tentang Larangan Penggunaan Benzil Piperazin Dalam Suplemen Makanan
26. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian *Field Research* Kualitatif. Penelitian lapangan dan penelitian empiris dilakukan dengan bertitik tolak dari data-data primer yang diperoleh ditempat penelitian.¹ Dalam hal ini adalah untuk mencari data tentang masalah pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Lokasi penelitian adalah tempat di mana penulis akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi. Adapun lokasi penelitian berlangsung di Pengadilan Negeri Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Secara sederhana, yuridis berarti sesuai hukum, secara hukum dan menurut hukum.² Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.³

¹ Muhamad Naszir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 63.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi IV* (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), h. 1567.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h.14.

Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang ada.

C. Sumber Data

Dalam proses penelitian ini, data yang digunakan berjenis data kualitatif yang terdiri atas:

1) Data Primer

Berupa data yang didapatkan secara langsung yang terdiri atas: hasil-hasil wawancara, dokumentasi dan observasi empiris.

2) Data Sekunder

Berupa data yang diperoleh dari berbagai literature yang relevan dengan masalah yang diangkat. Literatur yang dimaksudkan berupa buku (cetak maupun elektronik), sumber-sumber hukum tertulis, *database software* dan artikel (*online dan offline*).

D. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

1) Wawancara

Berupa proses tatap muka dalam rangka *interview* dengan responden guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

2) Dokumentasi

Berupa pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi bukti dan keterangan (gambar, kutipan, dan bahan referensi lain) sebagai data yang mendukung penelitian.

3) Studi Pustaka

Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan – bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh data-data penelitian adalah wawancara dan studi kepustakaan. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penulis dalam pengolahan dan menganalisa data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Recidive Penyalahgunaan Narkoba dalam putusan No. 1062/Pid.B/2014/PN.Mks

Sebelumnya penulis akan terlebih dulu membahas putusan pengadilan negeri Makassar nomor 1062/Pid.B/2014/PN.Mks:

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	: SYAMSUDDIN bin KAHAR
Tempat Lahir	: Makassar
Umur/Tgl Lahir	: 21 Tahun/ 07 April 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Monginsidi Baru No.04 Kota Makassar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: -
Pendidikan	: SD (Tamat)

2. Kasus Posisi

Berawal ketika terdakwa mendatangi Lk. Arman Alias Adi (DPO) yang beralamat di Jalan Kerung-kerung Makassar, terdakwa memesan 1 paket narkoba jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp. 200.000,-. Selanjutnya setelah terdakwa

menerima paket tersebut, terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Jl. Monginsidi. Setibanya di rumah, terdakwa menghubungi Lk. Ilham via telepon genggam dan mengundang Lk. Ilham untuk datang kerumahnya. Selang beberapa waktu Lk. Ilham datang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa dan Lk. Ilham menggunakan sebagian paket shabu-shabu bersama-sama. Setelah terdakwa dan Lk. Ilham menggunakan shabu-shabu, terdakwa dan Lk. Ilham pergi meninggalkan rumah terdakwa dan sisa dari paket shabu-shabu tersebut beserta alat penghisapnya disimpan dalam saku celana terdakwa.

Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan singa sering terjadi peredaran narkoba, Lk. Faisal dkk yang sedang patroli langsung melakukan pemantauan. Lk. Faisal yang melihat terdakwa dan Lk. Ilham melintas di Jl. Singa curiga dengan gerak-gerik terdakwa dan Lk. Ilham sehingga Lk. Faisal dkk langsung mendekati terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan Lk. Ilham. Setelah melakukan pemeriksaan, Lk. Faisal dkk menemukan 1 paket shabu-shabu/bong, 1 buah pireks kaca, 1 buah sumbu, 1 buah korek gas dan 2 potong pipet plastik didalam saku celana terdakwa, sedang pada Lk. Ilham tidak ditemukan apapun. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya segera diamankan ke Polres Pelabuhan Makassar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 853/ NNF/ V/ 2014, tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si., Faisal Rachmad, ST., Hasura Mulyani, Amd. dan Usman,

S.si. masing-masing selaku pemeriksa pada pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar terhadap 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,0818 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastik putih dan urine milik terdakwa SYAMSUDDIN bin KAHAR adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SYAMSUDDIN bin KAHAR bersama dengan Ir. Ilham bin Said (berkas perkara terpisah/split), pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Jalan Singa Kota Makassar atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *“telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SYAMSUDDIN bin KAHAR, pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Jalan Singa Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***“melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”***.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Tuntutan oleh Penuntut Umum

Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2014 yang pada pokoknya memohon, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUDDIN bin KAHAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SYAMSUDDIN bin KAHAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditangkap maupun ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu seberat 0,0612
- 1 (satu) buah pirek kaca
- 1 (satu) sumbu
- 1 (satu) set alat penghisap shabu
- 1 (satu) buah korek gas
- 2 (dua) potong pipet plastic

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

5. Amar Putusan

Adapun yang telah menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUDDIN bin KAHAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu seberat 0,0612, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) sumbu, 1 (satu) set alat penghisap shabu, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) potong pipet plastik, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

6. Analisis

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar diatas, tampak bahwa terpidana didakwa oleh Penuntut Umum dengan dua pasal yang disusun secara alternatif.

Menurut Van Bemmelen, dakwaan alternatif dibuat dalam dua hal yaitu:

1. Jika Penuntut Umum tidak mengetahui perbuatan mana apakah yang satu ataukah yang lain akan terbukti nanti dipersidangan suatu perbuatan apakah merupakan pencurian atau penadahan.
2. Jika Penuntut Umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.¹

Sehingga dapat dikatakan bahwa dakwaan alternatif adalah dakwaan yang terdiri dari dua dakwaan atau lebih yang disusun secara berlapis, dimana dakwaan

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 185.

yang satu dengan dakwaan yang lain saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat ditujukan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Kedua pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam menjerat terpidana adalah Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat “Undang-Undang Narkotika”).

Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa:

a. Pasal 112 ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).”²

Pasal 112 ayat (1) diatas dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang: bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap subjek hukum (pemangku/pendukung hak dan kewajiban) atau semua orang yang cakap hukum (cukup umur, tidak dibawah pengampunan dan tidak dalam keadaan terganggu jiwanya).
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum: bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

² Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan: Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Memiliki adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman agar tidak rusak dan hilang, menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan adalah mengadakan sesuatu.³
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman: Bahwa Menurut Soerdjono Dirjosisworo yang dimaksud “Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya dan daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan.”⁴

b. Pasal 132 ayat (1)

*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal tersebut..*⁵

Setelah menganalisa segala bukti-bukti yang diajukan didalam persidangan dan mengkorelasikannya dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, Penuntut Umum kemudian menarik kesimpulan bahwa terpidana terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika yang mengatur bahwa:

³ Ebta Setiawan, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*. <http://kbbi.web.id/candu> (1 Januari 2015).

⁴ Wiwin, “Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Atas Terdakwa Riga Raditya Arnaya” (Berkas Peradilan Semu yang dibuat dalam rangka mengikuti lomba peradilan semu Universitas Udayana Bali, Tahun 2011)

⁵ Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”⁶

Unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum; dan
3. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Kemudian diuraikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang: Yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti (petunjuk) yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Syamsuddin Bin Kahar telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum: Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat maupun barang bukti (petunjuk) diperoleh suatu fakta hukum bahwa terdakwa bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter

⁶ Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

3. Menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri: Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti (petunjuk) diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa sering menggunakan narkoba jenis shabu-shabu. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menurut penulis, Penuntut Umum dalam mengurai unsur-unsur pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkoba masih belum jelas. Penuntut Umum, masih belum menjelaskan apa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan/atau melawan hukum” serta tidak memasukkan fakta persidangan yang mereka maksud.

Yang menjadi pembahasan dalam konteks penerapan hukum yang pertama adalah pembuktian terhadap dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkoba atas dakwaan pertama yakni, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Narkoba. Penerapan hukum yang kedua adalah tentang pemberatan pidana bagi *recidive* narkoba.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, penulis menyimpulkan alasan mengapa Penuntut Umum tidak menerapkan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Narkoba melainkan menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a adalah karena di dalam persidangan melalui keterangan terdakwa terbukti bahwa narkoba jenis

shabu-shabu (narkotika golongan I bukan tanaman) yang ditemukan di dalam saku celana terpidana ditujukan untuk konsumsi pribadi, bukan untuk diedarkan. Sedangkan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Narkotika mengatur tentang perbuatan yang masuk dalam kategori distributor (pengedar), bukan untuk penyalahguna atau pecandu narkotika. Oleh karena itu, Penuntut Umum melalui bukti di persidangan yang mengarahkan kepada pernyataan terpidana yang menyatakan bahwa narkotika jenis shabu yang dimilikinya adalah untuk dikonsumsi bagi diri sendiri sehingga lebih tepat dijerat dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a. Pendapat Penuntut Umum menurut penulis ada benarnya, namun menurut penulis terpidana juga dapat didakwa dengan pasal 134 karena terpidana merupakan pecandu narkotika, terbukti dengan ditangkapnya terdakwa untuk yang kedua kalinya karena tindak pidana yang sama. Hal tersebut membuktikan bahwa terdakwa belum bisa bebas dari pengaruh narkoba, sesuai dengan bunyi pasal 134 ayat (1):

“Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).”⁷

Pecandu menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika, adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Jika melihat terpidana Syamsuddin Bin Kahar yang telah memakai narkoba dan telah tertangkap lebih dari satu kali, maka jelas bahwa terpidana adalah seorang pecandu narkoba. Dan

⁷ Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

mengetahui terpidana berusia 21 tahun, telah membuktikan bahwa terpidana telah cukup umur. Begitu juga dengan terpidana yang selama ini tidak pernah melaporkan mengenai kecanduan dirinya, telah membuktikan bahwa terpidana tidak memiliki keinginan untuk melaporkan dirinya sebagai seorang pecandu. Sehingga penulis berpendapat jika terpidana dapat dijerat dengan pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Sedangkan penerapan mengenai pemberatan pidana *residivis narkoba*, belum sepenuhnya diterapkan dalam putusan nomor: 1062/Pid.B/2014/PN.Mks, terbukti dengan tidak diterapkannya pasal 144 ayat (1) dalam dakwaan terpidana, mengingat terpidana pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Juli 2012 dalam Putusan Nomor: 775/Pid.B/2012/PN.Mks melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri”. Sudah seharusnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa terpidana dengan mengaitkan pasal 144 ayat (1) dengan pasal 127 sebagaimana bunyi pasal 144 ayat (1) tersebut dibawah:

“Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).”⁸

Melihat putusan pertama terpidana yang dijatuhkan pada tahun 2012 dan putusan terbaru terpidana pada tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa terpidana telah melakukan pengulangan tindak pidana karena terpidana belum melewati jangka

⁸ Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

waktu 3 tahun yang dimaksud dalam pasal 144 ayat (1) tersebut diatas. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap residivis dalam putusan no. 1062/Pid.B/2014/PN.Mks belum sepenuhnya diterapkan.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 1062/Pid.B/2014/PN.Mks.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri pula suatu negara hukum. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti dikehendaki Pasal 24 UUD 1945. Pasal 24 UUD setelah diamandemen ke-3 dan ke-4 berbunyi sebagai berikut:⁹

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

⁹ Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 3 dan 4.

Putusan hakim atau biasa juga disebut putusan pengadilan menurut pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁰ Oleh karena itu putusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti di pengadilan.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan terpidana bersalah dalam Putusan Nomor 1062/Pid.B/2014/PN.Mks :

1. Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan kepersidangan telah didakwa oleh penuntut umum melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 172 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan beberapa saksi atas sumpah menurut agamanya masing-masing antara lain sebagai berikut:
Saksi FAISAL dan MULAWARMAN telah memberikan keterangan sesuai apa yang diberikan kepada penyidik dan keterangan telah termuat dalam berita acara persidangan dimana keterangannya pada pokoknya telah mendukung dakwaan penuntut umum dan memberatkan perbuatan terdakwa;
3. Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa sebagai barang yang telah dibuat pada saat terdakwa melakukan kejahatannya tersebut;

¹⁰ Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

4. Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan keterangan tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan ini;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka didapatkan fakta-fakta dipersidangan, dimana keterangan para saksi yang didengar dibawah sumpah antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan dengan keterangan terdakwa serta dengan diajukan barang bukti dipersidangan maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;
6. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam rumusan delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dinyatakan terbukti secara menurut hukum dan majelis yakin akan kesalahan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
7. Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;
8. Menimbang, bahwa majelis tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa tersebut sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

9. Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya karenanya harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara;
10. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, penahanan terdakwa harus tetap dilanjutkan agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan hukuman yang akan dijatuhkan;
11. Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan seluruhnya haruslah dikurangkan dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;
12. Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
13. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri terdakwa baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menurut pandangan penulis dalam putusan ini masih terdapat kekurangan dipertimbangan hakim. Kekurangan tersebut adalah hakim tidak mempertimbangkan perbuatan terpidana sebagai pengulangan kejahatan, hal itu terlihat dalam hukuman yang diterima oleh terpidana pada putusan nomor: 1062/Pid.B/2014/PN.Mks. yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dimana hukuman tersebut lebih ringan dari hukuman sebelumnya pada putusan nomor: 775/Pid.B/2014/PN.Mks. yakni 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan. Sehingga hal tersebut tidak dapat memberikan efek jera kepada terpidana dan membuat terpidana berani mengulangi perbuatannya lagi dan lagi. *Residivis* seharusnya mendapat hukuman tambahan atau pemberatan hukuman seperti yang tercantum pada pasal 144 ayat (1) Undang-undang Narkotika. Seperti yang dikatakan oleh Nathan Lambe, S.H., M.H. salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, bahwa jika seseorang pelaku tindak pidana mengulangi kejahatannya maka sewajarnya hakim memberikan penambahan hukuman atau pemberatan sehingga hukumannya tidak akan sama lagi dengan hukuman sebelumnya.¹¹

Selain itu, penulis juga berpendapat bahwa hakim dalam putusannya sebaiknya memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Sebagaimana yang diketahui bahwa Undang-Undang Narkotika menganut pendapat bahwa para Penyalahguna dan Pecandu Narkotika adalah manusia-manusia

¹¹ Nathan Lambe, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 Januari 2015.

yang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan medis untuk menyembuhkan atau setidaknya tidaknya menekan pertumbuhan penyakit mereka. Oleh karena itu, para pembuat Undang-Undang mewajibkan para pecandu dan penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 54 undang-undang narkotika mengatur sebagai berikut:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”¹²

Ini adalah amanah bagi setiap Hakim yang memutus seseorang bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, b, dan c. Amanah ini diatur di dalam Pasal 127 ayat (2) yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.”¹³

Menurut penulis pasal 54 undang-undang narkotika seharusnya dapat dimasukkan dalam pertimbangan hakim walaupun terpidana merupakan *residivis* yang telah menjalani hukuman penjara. Karena dapat dilihat dalam pasal 54 undang-undang narkotika menjelaskan bahwa tak hanya penyalahguna narkotika yang wajib untuk direhabilitasi tetapi juga pecandu narkotika sehingga seorang *residivis* juga berhak untuk mendapatkan pertimbangan tersebut dari hakim. Akan tetapi, hakim juga perlu memperhatikan beberapa hal sebelum mempertimbangkan pasal 54 kepada seorang *residivis*. Menurut penulis, dalam putusan nomor: 1062/Pid.B/PN.Mks

¹² Pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹³ Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

tersebut hakim dapat mempertimbangkan pasal 54 undang-undang narkotika kepada terpidana dengan melihat fakta bahwa hukuman penjara yang selama ini dijalani oleh terpidana tidak dapat menghilangkan kecanduan terhadap narkotika yang dialami diri terpidana, sehingga sebaiknya hakim mempertimbangkan agar terpidana direhabilitasi.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, serta tuntutan jaksa maupun muatan psikologis. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari prinsip keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme. Sehubungan dengan kasus ini, Majelis Hakim seharusnya memasukkan hal-hal yang menjadi pertimbangannya yang setidaknya menjawab pertanyaan mengapa sehingga terpidana tidak diberikan pemberatan hukuman atau mengapa terpidana tidak dimasukkan ke dalam program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut penulis, sebaiknya hakim dalam putusan tersebut harus lebih mempertimbangkan pasal 54 dibandingkan pasal 144 ayat (1) karena terpidana merupakan seorang pecandu narkotika yang dalam hal ini juga merupakan korban dari barang haram tersebut dan bandar narkoba yang harus diobati. Oleh sebab itu, terpidana sebaiknya diberikan sanksi tindakan dengan dimasukkan kedalam panti rehabilitasi dikarenakan putusan pertama yang dijatuhkan kepada terpidana yaitu

hukuman penjara tidak membuat terpidana sembuh dari kecanduannya akan tetapi terpidana malah menjadi seorang *residivis*. Apalagi mengingat keadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini yang perlu untuk dibenahi membuat proses pemulihan bagi pecandu atau penyalahguna narkoba tidak dapat berjalan dengan efektif. Hal tersebut menurut penulis tidak ada salahnya untuk dilakukan oleh hakim mengingat masalah rehabilitasi untuk pecandu atau penyalahguna narkoba tak hanya diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi juga diatur dalam SEMA No. 04 Tahun 2010 dan SEMA No. 03 Tahun 2011.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum *Recidive* Penyalahgunaan Narkoba dalam putusan No.1062/Pid.B/2014/PN.Mks. yang mengacu pada undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika belum sepenuhnya sesuai sebab Jaksa Penuntut Umum tidak mengaitkan pasal 127 ayat (1) huruf a dengan pasal 144 ayat (1) undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga dalam putusan tersebut, pasal 144 ayat (1) tentang pemberatan pidana yang seharusnya didapatkan oleh seorang *residivis* penerapannya belum efektif.
2. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam perkara No.1062/Pid.B/2014/PN.Mks adalah selain memasukkan alasan-alasan sosiologis atau dalam amar putusan biasa disebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, hakim juga mempunyai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus suatu perkara seperti pada seberapa banyak barang buktinya dan banyak lagi pertimbangan lainnya. Dalam putusan tersebut, pertimbangan hukum oleh hakim masih belum maksimal karena masih terdapat kekurangan yakni hakim tidak/lupa mempertimbangkan pasal 144

ayat (1) Undang-undang Narkotika mengingat terpidana merupakan seorang *residivis*.

B. Implikasi Penelitian

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya sosialisasi sedini mungkin tentang narkoba terhadap anak baik dari orang tua, guru maupun instansi pemerintah.
2. Diharapkan adanya pembinaan terhadap masyarakat terlebih orang tua dalam berinteraksi dengan anaknya.
3. Diharapkan kepada pihak kepolisian dan masyarakat agar senantiasa bekerjasama dalam mengawasi peredaran narkoba.
4. Disarankan kepada hakim yang memeriksa perkara tindak pidana narkotika, agar memperhatikan bahwa terdakwa penyalahgunaan narkoba sesungguhnya juga adalah merupakan korban peredaran gelap narkoba yang perlu direhabilitasi.
5. Diharapkan kepada hakim untuk mempertimbangkan pasal 54 undang-undang narkotika dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku penyalahguna narkotika maupun *residivis* penyalahguna narkotika yang pada umumnya merupakan korban yang perlu pengobatan.
6. Diharapkan kepada hakim agar memberikan pemberatan atau penambahan hukuman terhadap *residivis*.

KEPUSTAKAAN

- Ainurrohmah, Leni. "Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011.
- AR. Sujono dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011.
- Bahiej, Ahmad. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bidang Akademik Jl. Marsd Adisucipto UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Modul Untuk Remaja: Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati*. Jakarta: BNN, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi IV*. Jakarta: PT. Gramedia, 2012.
- Firdaus, Azif. "Penerapan Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klas I A Padang)". *Skripsi*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2008.
- Hamzah, Andi. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hamsah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986.
- Hulukati, Tien S. *Hukum Pidana*. Bandung, 2014.
- Jamilah, Fitrothin. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2014.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur mahasiswa.
- Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Makaro, Moh. Taufik, dkk. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1985.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Naszir, Muhamad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Partodihardjo, Subagyo. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. n.p., 2006.
- Pradana, Dimas. "Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr)". *Skripsi*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011.

- Putra, Zelni. "Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN/Kota) Padang (Studi Kasus di BNNK/Kota Padang)". *Skripsi*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011.
- Ramadhan, Realizhar Adillah Kharisma. "Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sungguminasa)". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Rifai, Achmad. *Narkoba Dibalik Tembok Penjara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Tim Visi Media. *Mencegah Terjerumus Narkoba*. t.t.: Tim Visi Media, 2006.
- Wienahyu, Rio Sungsang. "Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 68/Pid.Sus/2011/Pn.Pwt)". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Hukum Purwokerto, 2012.
- Wiwin, "Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Atas Terdakwa Riga Raditya Arnaya". Berkas Peradilan Semu yang dibuat dalam rangka mengikuti lomba peradilan semu Universitas Udayana Bali, Tahun 2011.

Website:

- Haryanto. "Belajarpsikologi.com: Pengertian Narkoba dan Jenis-Jenis Narkoba". *belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba*. (8 Desember 2014).
- Nizami, Agus. "Minuman Keras dan Narkoba (Arak/Khamar) itu Haram". *Media Islam*. <http://media-islam.or.id/2012/10/10/minuman-keras-dan-narkoba-arakkhamar-itu-haram/> (02 April 2015).
- Qunsul, Rudi. "Narkoba Menurut Pandangan Agama", *Blog My Life*. <http://sarahmayselalu.blogspot.com/2012/12/narkoba-menurut-agama.html> (01 Desember 2014).
- Rosidin, Ayib. "Kejahatan Narkotika dan Upaya Penanggulangannya", *Blog Ayib Rosidin*. <http://ajhieblog.blogspot.com/2012/05/kejahatan-narkotika-dan-upaya.html> (4 Januari 2015).
- Setiawan, Ebta. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). <http://kbbi.web.id/candu> (1 Januari 2015).
- Setioko, Budi. "Faktor Penyebab Pengedaran Narkoba Di Indonesia Di Lihat Dari Aspek Sosiologi Hukum", *Blog Sipakalabbi*. <http://zainuddin.blogspot.com/2009/09/faktor-penyebab-pengedaran-narkoba-di.html> (4 Januari 2015).
- Tukiman. "Hukum Islam Tentang Khamer (Minuman Keras)", *Tukiman Blog*. <https://tukiman25.wordpress.com/2013/03/16/hukum-islam-tentang-khamer-minuman-keras/> (02 April 2015).

Wahono, Tri. "Freddy Budiman, Bandar Narkotika Sejak 2009". *Megapolitan Kompas.com Online*. 27 Juli 2013. <http://megapolitan.kompas.com/read/2013/07/27/1145459/Freddy.Budiman.Bandar.Narkotika.sejak.2009> (05 Januari 2015).

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang Undang Dasar tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Republik Indonesia. Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap **DWI YULIANTI NUR**, lahir di Ujung Pandang tanggal 14 Juli 1992 merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Syarifuddin, S.H. dan Ibu Hasmah. Penulis sekarang bertempat tinggal di BTN. Tamarunang Indah Blok F1 No.

15. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Inpres Panggentungan Selatan pada tahun 2004, SMPN. 4 Sungguminasa pada tahun 2007, SMAN. 1 Sungguminasa pada tahun 2010, S1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2011 sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pengalam Organisasi, Penulis pernah menjabat sebagai Anggota Pramuka SPENPAT Scout di SMPN. 4 Sungguminasa tahun 2005-2007, Anggota Ikatan Penganut Peradilan Semu UIN Alauddin Makassar, Wakil Sekretaris HMJ Ilmu Hukum 2013-2014, Wakil Sekertaris di PERMAHI Cab. Makassar Tahun 2013-2015.